

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia industri di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2020 yang berada di level 46,9 dibandingkan dengan sebelumnya di posisi 39,1 (Trimahanani, 2020). Makin berkembangnya suatu perusahaan tentu diiringi dengan meningkatnya masalah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang semakin tinggi, karena adanya aktivitas perusahaan yang tidak terkendali terhadap berbagai sumber daya demi meningkatkan laba perusahaan (Sabatini, 2019).

Berbagai permasalahan sosial dan lingkungan hidup di Indonesia banyak terjadi pada perusahaan manufaktur, seperti pencemaran lingkungan, polusi udara, limbah produksi, serta permasalahan keamanan produk dan tenaga kerja, dikarenakan perusahaan ini paling banyak berinteraksi dengan masyarakat (Merakati, 2016). Salah satu fenomena yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan akibat dari adanya aktivitas perusahaan yaitu adanya kasus pencemaran lingkungan di Medan, Sumatra Utara pada tahun 2019, yang disebabkan oleh pabrik milik PT Indofood dimana ditemukannya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tercecer di lingkungan pabrik,

baik limbah yang berasal dari bumbu-bumbu mie instan, maupun minyak bekasnya. Kondisi tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pujiyanto, 2019). Hal tersebut menunjukkan adanya dampak pada CSR.

Perusahaan dalam menjaga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya, karena peran masyarakat sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan dan keberlanjutan suatu perusahaan (Kusumawardani dan Sudana, 2017). Upaya perusahaan untuk meningkatkan tingkat kepedulian sosial dan nilai perilaku yang baik terhadap lingkungan maupun masyarakat dapat diwujudkan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Putri, 2017). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi (Noviani, 2017).

Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan perlu disampaikan kepada *stakeholder*. Pengungkapan CSR merupakan sebuah informasi yang diungkapkan oleh manajemen kepada para *stakeholder* mengenai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan (Devita, 2015). Salah satu media pengungkapan yang digunakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas CSR perusahaan dapat diungkapkan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*), yang mana laporan tersebut dapat diterbitkan secara

terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (*annual report*) (Merakati, 2016).

Pengungkapan kegiatan CSR diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Kepada Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang ditujukan untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan pelaporan dan penerbitan laporan berkelanjutan (*sustainability report*). Kegiatan CSR bersama pelaporannya didukung dengan adanya *Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah mengeluarkan item-item yang memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) (Putri, 2020). Terkait dengan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan kegiatan CSR namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dengan adanya seminar kerjasama yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan GRI Indonesia di Jakarta, yang mengungkapkan bahwa terdapat data terbaru dari GRI dan BEI yang menunjukkan bahwa hanya sebanyak 110 *sustainability report* yang sudah dirilis dari total 629 perusahaan tercatat per 23 April 2019 (Kencana, 2019). Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR masih cukup rendah. Akibat yang mungkin akan diterima oleh perusahaan apabila tidak melakukan pengungkapan CSR dapat berupa teguran dari pemerintah maupun masyarakat, dan juga penolakan dari masyarakat yang akan mengakibatkan

perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, akibat perilaku perusahaan yang dinilai buruk karena hanya mementingkan keuntungan saja tetapi tidak memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Merakati, 2016).

Ada banyak faktor yang dianggap mampu mempengaruhi pengungkapan CSR. Faktor tersebut diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki selama periode tertentu (Utamie dan Akram, 2020). Profitabilitas dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan CSR karena perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan memiliki banyak dana yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan CSR (Putri, 2020). Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR juga didukung dengan adanya teori *stakeholder*. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*, sehingga keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan para *stakeholder* (Putri, 2017). Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi menandakan kinerja perusahaan yang baik sehingga lebih mendapatkan sorotan publik, dengan begitu perusahaan akan mengungkapkan CSR lebih luas agar diterima oleh *stakeholder* yang akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan (Zulhaimi, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Rofiqkoh dan Priyadi (2016), Noviani (2017), Putri dan Gunawan (2019), serta Utamie dan Akram (2020) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salehi, dkk (2018) dan Arjanggie (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut juga berbeda dengan penelitian Sunarsih dan Nurhikmah (2017), Basit, dkk (2019), serta Tampubolon dan Siregar (2019) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan (Asiah dan Muniruddin, 2018). Ukuran perusahaan diperkirakan dapat mempengaruhi pengungkapan CSR karena perusahaan yang besar lebih banyak memiliki informasi daripada perusahaan kecil, sehingga item-item yang harus diungkapkan akan menjadi lebih banyak, salah satunya mengenai pengungkapan CSR (Putri dan Gunawan, 2019). Didukung dengan adanya teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah *stakeholder* yang lebih banyak sehingga akan mengungkapkan CSR yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* (Andriana, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rani (2015), Kusumawardani dan Sudana (2017), Tampubolon dan Siregar (2019), serta Utamie dan Akram (2020) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun hasil penelitian

Viviliana (2016), Mawarni (2017), serta Sekarwigati dan Effendi (2019) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut juga bertentangan dengan penelitian Rindawati (2015), Pradyani (2015), serta Sunarsih (2017) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan lainnya (Budiman, 2015). Kepemilikan institusional dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan CSR karena semakin besar jumlah kepemilikan institusional maka akan semakin besar dorongan pada pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR (Purwaningsih, 2018). Didukung dengan adanya teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan perusahaan, dalam hal ini pihak institusi dianggap sebagai pihak yang mampu dalam memantau dan mengelola investasinya, baik dari segi informasi, pengetahuan, maupun sumber daya yang dimiliki (Nurkasanah, 2020). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2015), Malik (2017), Sunarsih (2017), serta Vishesha dan Efendi (2019) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Sari dan Rani (2015), Diana (2017), serta Sukasih dan Sugiyanto (2017), yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, hasil penelitian Noviani (2017), Salehi, dkk (2017), serta Putri dan Gunawan (2019) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan tanpa ada pengaruh dari hubungan bisnis atau yang lainnya (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2006). Dewan komisaris independen diperkirakan dapat mempengaruhi pengungkapan CSR karena dewan komisaris independen berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan, sehingga apabila jumlah anggota dewan komisaris independen semakin besar, maka pengungkapan CSR juga akan semakin besar (Siti, 2016). Didukung dengan adanya teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen merupakan mekanisme akuntabilitas yang berperan meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi semua kepentingan *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saham, dan dalam hal ini dewan komisaris independen memiliki wewenang yang dapat memberikan pengaruh cukup kuat yang dapat menekan manajemen terkait kegiatan CSR dan pengungkapannya (Nurkasanah, 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016), Siti (2016), Alvarez (2017), serta Nurhandika dan Hamzah (2019), yang membuktikan bahwa dewan

komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sholihin, dkk (2018), Maesaroh (2020), serta Kusumawardani dan Sudana (2017) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut juga berbeda dengan penelitian Noviani (2017), Sunarsih (2017), serta Asiah dan Muniruddin (2018) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Utamie dan Akram (2020), dikarenakan terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun periode, variabel dan sampel yang digunakan. Dimana penelitian terdahulu menggunakan periode 2016-2018 dengan variabel yang digunakan yaitu komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage*. Sehingga peneliti mengurangi variabel komite audit dan *leverage* karena peneliti hanya mengambil variabel yang menunjang penelitian seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan menambahkan variabel baru yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen. Variabel kepemilikan institusional dipilih berdasarkan dugaan bahwa kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk lebih melakukan pengungkapan CSR dikarenakan tuntutan dari pihak institusi untuk lebih luas dalam pengungkapan informasi perusahaan khususnya terkait dengan informasi CSR (Rahmasari, 2020). Sedangkan variabel dewan komisaris

independen dipilih berdasarkan dugaan bahwa keberadaan dewan komisaris independen akan dapat mengontrol dan mengarahkan aktivitas perusahaan, yang salah satunya adalah aktivitas pengungkapan CSR (Ginting, 2016).

Perbedaan selanjutnya terletak pada tahun penelitian dimana penelitian ini menggunakan periode 2016-2019 dengan mengambil sampel pada perusahaan *food and beverage*. Alasan peneliti menggunakan *food and beverage* karena perusahaan *food and beverage* menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Sektor *food and beverage* berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB, nilai ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Sektor *food and beverage* juga menjadi salah satu perusahaan percontohan di Indonesia dalam penerapan industri 4.0 (Winosa, 2019). Hal tersebut akan menjadikan perusahaan *food and beverage* lebih mendapatkan sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi bersinggungan dengan kepentingan luas (*stakeholder*), sehingga diyakini bahwa perusahaan tersebut akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih banyak. Alasan selanjutnya yaitu karena perusahaan *food and beverage* memberikan lebih banyak dampak atau pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan *food and beverage* juga memerlukan pandangan yang lebih baik dari masyarakat dikarenakan rawan mendapatkan kritikan dari aktivis sosial dan juga pengaruh politik (Andriana, 2019). Dengan alasan-alasan tersebut

membuat pengungkapan CSR di perusahaan *food and beverage* menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen untuk diteliti pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR. Sehingga penelitian yang dilakukan diberi judul **“PENGARUH TINGKAT PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (studi empiris pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ?

4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan serta agar penelitian lebih fokus dan terarah sesuai dengan masalah yang ada, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang digunakan dalam populasi ini yaitu perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan tahun 2016-2019.
2. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu pengungkapan CSR, variabel independennya yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen.
3. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.
- b. Untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.

- c. Untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.
- d. Untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan dibidang akuntansi khususnya tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR.
- b. Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait dengan pelaporan dan pengungkapan CSR.
- c. Bagi akademis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi mengenai konsep atau teori CSR dan pengungkapannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.